

STUDI LITERATUR: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMERATAAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Yudi Haryadi

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received April 18, 2026

Revised Mei 22, 2026

Accepted Juni 16, 2026

Keywords:

Infrastructure Development
Economic Equity
Regional Economic Growth
Regional Disparities

ABSTRACT

Infrastructure development is a strategic instrument for promoting regional economic growth, strengthening connectivity, improving productivity, and expanding public access to markets and essential services. However, unequal infrastructure distribution may reinforce regional disparities when its benefits are concentrated in already-developed areas. This study aims to analyze the influence of infrastructure development on regional economic growth, examine the relationship between infrastructure distribution and interregional economic growth, and identify the factors determining the effectiveness of infrastructure in promoting economic equity. The study employed a literature review method with a qualitative descriptive approach. Secondary data were collected from academic books, national and international journal articles, research reports, and relevant official publications. The selected literature was processed through source verification, information reduction, thematic classification, and comparative synthesis. The data were analyzed using descriptive content analysis to identify similarities, differences, patterns, and research gaps in previous studies. The findings indicate that infrastructure generally promotes regional economic growth by improving connectivity, reducing logistics and transaction costs, attracting investment, supporting local businesses, and increasing access to basic services. Nevertheless, its effects vary according to infrastructure type, network integration, regional economic structure, and local capacity. Equitable infrastructure distribution can reduce regional disparities when development priorities are based on service gaps, geographical conditions, local economic potential, and community needs. The study concludes that infrastructure development does not automatically generate inclusive and equitable growth. Its effectiveness depends on integrated planning, accountable governance, sustainable financing, network connectivity, human resource capacity, community participation, proper maintenance, and environmental sustainability. Therefore, physical infrastructure development must be combined with local economic empowerment and human capital development to achieve sustainable and equitable regional growth.



Copyright © 2026 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Yudi Haryadi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April
Jln. Angkrek Situ No 19 Sumedang
Email: yudiharyadi2887@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, serta fasilitas sosial berperan sebagai modal publik yang menunjang aktivitas produksi dan distribusi. Aschauer (1989) menjelaskan bahwa investasi publik pada infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas perekonomian karena mampu menurunkan biaya produksi dan memperbaiki efisiensi kegiatan ekonomi. Dengan demikian, infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai fondasi bagi perkembangan kegiatan ekonomi suatu wilayah.

Ketersediaan infrastruktur transportasi dapat memperlancar mobilitas manusia, barang, dan jasa, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pasar, pusat produksi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Banister (2005) menerangkan bahwa hubungan antara transportasi dan pembangunan wilayah terbentuk melalui peningkatan aksesibilitas dan perubahan pola aktivitas ekonomi. Sejalan dengan itu, Timmermans (2003) menempatkan sistem transportasi sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi perkembangan spasial karena perubahan aksesibilitas akan memengaruhi pemilihan lokasi permukiman dan kegiatan ekonomi.

Dalam teori pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur dapat menghasilkan efek langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan daerah. Efek langsung dapat muncul melalui kegiatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan permintaan terhadap bahan baku selama proses pembangunan. Sementara itu, efek tidak langsung terjadi melalui penurunan biaya logistik, peningkatan produktivitas, perluasan pasar, serta tumbuhnya investasi dan aktivitas ekonomi baru. Boadway dan Tremblay (2006) menunjukkan bahwa infrastruktur publik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi apabila investasi tersebut mampu meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi. Todaro dan Smith (2015) juga menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur dasar merupakan bagian penting dalam proses pembangunan karena dapat memperluas kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Meskipun demikian, hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu berlangsung secara otomatis. Manfaat infrastruktur dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, ketepatan lokasi, konektivitas antarsistem, kondisi kelembagaan, struktur ekonomi daerah, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi yang terbentuk. Acemoglu dan Robinson (2012) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi. Infrastruktur yang dibangun tanpa tata kelola yang baik, kepastian hukum, akuntabilitas, dan akses yang inklusif berisiko menghasilkan manfaat yang tidak merata.

Pembangunan jaringan jalan, misalnya, dapat meningkatkan konektivitas dan menurunkan waktu perjalanan. Namun, penambahan kapasitas jalan yang tidak disertai pengelolaan transportasi dan tata ruang yang baik dapat menimbulkan dampak lain berupa peningkatan lalu lintas dan kemacetan. Duranton dan Turner (2011) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas jalan dapat mendorong pertumbuhan volume kendaraan sehingga manfaat penambahan jalan berpotensi berkurang akibat kemacetan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah atau panjang infrastruktur, tetapi juga berdasarkan kualitas pemanfaatan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan infrastruktur mempunyai tantangan yang lebih kompleks karena karakteristik wilayah yang luas, berbentuk kepulauan, serta memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda. Sebagian wilayah memiliki akses yang relatif baik terhadap jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan pusat pasar, sedangkan wilayah lainnya masih menghadapi keterbatasan konektivitas dan pelayanan dasar. Kondisi tersebut dapat memperbesar perbedaan biaya logistik, akses investasi, produktivitas, dan kesempatan ekonomi antardaerah.

Ketimpangan pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan kegiatan ekonomi semakin terkonsentrasi di daerah yang telah maju. Daerah dengan infrastruktur yang lebih lengkap cenderung lebih mampu menarik investasi, mengembangkan industri, dan memperluas pasar tenaga kerja. Sebaliknya, daerah yang mempunyai keterbatasan infrastruktur berpotensi menghadapi biaya distribusi yang tinggi, rendahnya daya tarik investasi, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi. Akibatnya, pembangunan infrastruktur yang seharusnya memperkecil kesenjangan dapat memperkuat konsentrasi ekonomi apabila distribusi dan manfaatnya tidak dirancang secara adil.

Pembangunan infrastruktur karena itu perlu diarahkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan dan pembangunan yang inklusif. Setiawan et al. (2024) menjelaskan bahwa pembangunan inklusif dan industrialisasi memerlukan waktu untuk menghasilkan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu langsung meningkatkan kesejahteraan apabila hasil pembangunan tidak dapat diakses secara merata oleh kelompok masyarakat dan wilayah yang tertinggal.

Hutajulu et al. (2024) menekankan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan perlu memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta melibatkan berbagai sektor pembangunan. Dalam kerangka tersebut, pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, dan kemampuan wilayah dalam memelihara infrastruktur. Infrastruktur yang berkualitas bukan hanya infrastruktur yang selesai dibangun, melainkan infrastruktur yang dapat digunakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemerataan infrastruktur juga berkaitan dengan penataan ruang. Infrastruktur yang dibangun tanpa kesesuaian dengan rencana tata ruang dapat menimbulkan konflik pemanfaatan lahan, kerusakan lingkungan, dan perkembangan wilayah yang tidak terkendali. Pambudi dan Sitorus (2021) menegaskan pentingnya keterpaduan kebijakan pembangunan dengan penataan ruang agar pemanfaatan wilayah dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur perlu diselaraskan dengan potensi ekonomi, daya dukung lingkungan, struktur ruang, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Selain perencanaan dan tata ruang, efektivitas infrastruktur dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah. Daerah yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, sektor produktif yang berkembang, akses pembiayaan, dan pemerintahan yang efektif cenderung lebih mampu mengubah ketersediaan infrastruktur menjadi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur di wilayah yang belum mempunyai kapasitas produksi dan kelembagaan yang memadai berpotensi menghasilkan dampak ekonomi yang terbatas. Oleh sebab itu, investasi infrastruktur perlu disertai dengan pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan usaha lokal, peningkatan akses pembiayaan, dan kebijakan investasi yang sesuai dengan potensi daerah.

Dimensi lingkungan juga perlu diperhatikan karena pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan perubahan penggunaan lahan, tekanan terhadap sumber daya alam, dan risiko kerusakan ekosistem. Zahrah dan Rahayu (2024) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan menghadapi hambatan berupa keterbatasan konektivitas, kapasitas kelembagaan, dan kerentanan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan infrastruktur perlu disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah dan tidak dapat diterapkan melalui pendekatan yang seragam.

Sejumlah penelitian telah membahas pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hasilnya dapat berbeda bergantung pada jenis infrastruktur, wilayah penelitian, periode pengamatan, dan indikator yang digunakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja atau jumlah infrastruktur belum tentu menghasilkan tingkat pertumbuhan dan pemerataan yang sama pada setiap daerah. Masih diperlukan sintesis literatur yang tidak hanya membahas pengaruh langsung infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjelaskan kondisi yang menyebabkan manfaat pembangunan tersebar secara merata atau justru terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, studi literatur ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi mekanisme pengaruh infrastruktur terhadap kegiatan ekonomi, menjelaskan hubungan antara pemerataan infrastruktur dan kesenjangan antardaerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan efektivitas investasi infrastruktur. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan dasar konseptual bagi penyusunan kebijakan infrastruktur yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?
2. Bagaimana hubungan antara pemerataan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi antardaerah?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur dalam menciptakan pemerataan ekonomi?

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menyintesis berbagai teori serta hasil penelitian terdahulu mengenai pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam melalui data yang bersifat deskriptif. Sementara itu, Arikunto (2013) menjelaskan bahwa penelitian dokumentasi dapat dilakukan dengan menelaah sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, dokumen, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur. Sumber data meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang membahas pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, ketimpangan wilayah, dan pembangunan ekonomi inklusif. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, Portal Garuda, ScienceDirect, dan situs resmi lembaga pemerintah. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian, kejelasan identitas publikasi, kredibilitas sumber, dan kemampuannya dalam menjawab rumusan masalah.

Data diolah dengan memeriksa kelengkapan sumber, mencatat identitas bibliografis dan pokok pembahasan, menyeleksi informasi yang relevan, serta mengelompokkan literatur berdasarkan tema penelitian. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa pengolahan data kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menyusunnya ke dalam kategori, memilih informasi penting, dan membentuk pola yang dapat dipahami. Dalam penelitian ini, literatur dikelompokkan ke dalam tema pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur antardaerah, dampak infrastruktur terhadap ketimpangan wilayah, serta faktor-faktor yang menentukan efektivitas pembangunan infrastruktur.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setiap teori dan hasil penelitian dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kecenderungan temuan, faktor pendukung dan penghambat, serta kesenjangan penelitian. Arikunto (2013) menjelaskan bahwa data dokumentasi perlu diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara naratif untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan antara pembangunan infrastruktur, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pada umumnya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan membentuk modal dasar yang memungkinkan kegiatan produksi dan distribusi berjalan lebih efisien. Ketersediaan infrastruktur dapat memperlancar mobilitas manusia dan barang, menurunkan biaya logistik, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya tarik suatu daerah bagi kegiatan investasi. Meskipun demikian, besarnya pengaruh tersebut tidak selalu sama pada setiap jenis infrastruktur dan daerah.

Nasikhah dan Susilowati (2024) menemukan bahwa infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dapat memperbesar kapasitas perekonomian melalui peningkatan produktivitas dan kelancaran aktivitas ekonomi. Hasil yang relatif serupa dikemukakan Surtanto dan Lestari (2019), yang menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap PDRB provinsi di Indonesia. Infrastruktur tidak hanya menghasilkan kegiatan ekonomi pada masa konstruksi, tetapi juga menyediakan layanan yang digunakan oleh sektor rumah tangga dan dunia usaha dalam jangka panjang.

Mubin (2019) menjelaskan bahwa percepatan investasi infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, keputusan investasi tetap perlu mempertimbangkan tingkat pengembalian ekonomi proyek dan risiko pembiayaannya. Infrastruktur yang dibangun dengan pembiayaan besar, tetapi mempunyai manfaat ekonomi rendah, dapat meningkatkan beban fiskal tanpa menghasilkan pertumbuhan yang sebanding. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah proyek, tetapi juga dari manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan.

Temuan pada tingkat daerah memperlihatkan hasil yang lebih beragam. Panama et al. (2019), melalui kajian pada koridor utara-selatan Jawa Timur, menemukan bahwa infrastruktur air, listrik, dan pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, infrastruktur jalan dan kesehatan dalam model penelitiannya tidak menunjukkan pengaruh yang sama. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa jenis infrastruktur yang efektif pada suatu wilayah belum tentu memberikan dampak serupa pada wilayah lain karena perbedaan struktur ekonomi, kualitas pelayanan, kondisi awal, dan tingkat pemanfaatannya.

Almismary dan Wahyono (2020) juga menunjukkan bahwa perkembangan infrastruktur di Kota Banda Aceh berkaitan dengan investasi, konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, laju pertumbuhan ekonomi tetap dapat berfluktuasi meskipun pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa infrastruktur bukan satu-satunya penentu pertumbuhan ekonomi. Faktor investasi, konsumsi, kapasitas usaha, kualitas sumber daya manusia, dan kondisi perekonomian yang lebih luas juga memengaruhi hasil pembangunan.

Infrastruktur jalan mempunyai fungsi penting dalam membuka keterisolasian dan memperlancar kegiatan usaha. Dewi et al. (2022) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh positif

dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Desa Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Jalan yang lebih baik memperluas mobilitas konsumen dan pelaku usaha, mempermudah distribusi bahan baku serta produk, dan membuka peluang terbentuknya kegiatan ekonomi baru. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh infrastruktur dapat terlihat tidak hanya pada PDRB, tetapi juga pada perkembangan usaha lokal dan kesempatan kerja masyarakat.

Namun, dampak infrastruktur jalan tidak selalu besar. Ali dan Maskur (2022) menemukan bahwa pengaruh panjang, anggaran, dan kondisi jalan terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Parigi Moutong bersifat inelastis. Artinya, perubahan infrastruktur jalan menghasilkan perubahan ekonomi yang relatif lebih kecil. Temuan tersebut dapat terjadi ketika jalan belum terhubung secara efektif dengan pusat produksi dan pasar, kualitas jalan belum memadai, atau sektor ekonomi lokal belum mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan peningkatan konektivitas.

Ramadhan (2019) menjelaskan bahwa realisasi pembiayaan infrastruktur publik berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan aktivitas ekonomi pada sejumlah provinsi di Indonesia. Akan tetapi, pengaruh tersebut bergantung pada komposisi belanja dan kebutuhan daerah. Infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik perekonomian lokal cenderung menghasilkan manfaat lebih besar daripada proyek yang hanya mengikuti prioritas umum tanpa mempertimbangkan potensi dan persoalan wilayah.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pada umumnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas, produktivitas, investasi, dan akses pelayanan dasar. Akan tetapi, studi-studi tersebut tidak mendukung kesimpulan bahwa setiap proyek infrastruktur pasti menghasilkan pengaruh positif dan signifikan. Pengaruhnya ditentukan oleh jenis dan kualitas infrastruktur, keterhubungan jaringan, struktur ekonomi daerah, tingkat pemanfaatan, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas tata kelola dan pembiayaan.

Hubungan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi Antardaerah

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi antardaerah. Infrastruktur yang tersebar secara lebih merata dapat mengurangi hambatan geografis, memperluas akses wilayah tertinggal terhadap pasar, serta meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal. Sebaliknya, konsentrasi infrastruktur pada pusat-pusat ekonomi yang telah berkembang dapat memperkuat aglomerasi dan memperbesar kesenjangan dengan daerah yang masih kekurangan fasilitas dasar.

Ma'rifah (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia masih terlihat dari perbedaan Dana Alokasi Khusus, panjang jalan, dan tenaga kerja konstruksi. Penelitian tersebut menemukan bahwa infrastruktur panjang jalan dan tenaga kerja konstruksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia masih lebih tinggi daripada Kawasan Timur Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa penambahan infrastruktur perlu disertai strategi afirmatif untuk memperkuat kapasitas ekonomi wilayah yang tertinggal.

Sebayang dan Sebayang (2020) menemukan bahwa investasi infrastruktur cenderung meningkatkan perekonomian wilayah, tetapi dampaknya terhadap ketimpangan berbeda-beda. Pada sebagian wilayah, pembangunan infrastruktur diikuti penurunan ketimpangan, sedangkan pada wilayah lainnya justru diikuti peningkatan Indeks Theil. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur dapat menjadi instrumen pemerataan ketika membuka akses wilayah tertinggal, tetapi juga dapat memperkuat pusat pertumbuhan apabila manfaatnya terkonsentrasi pada daerah dan kelompok yang telah memiliki kapasitas ekonomi lebih kuat.

Matondang et al. (2024) juga menjelaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Ketersediaan infrastruktur yang lebih merata dapat memperlancar hubungan antardaerah dan memperbesar peluang berkembangnya aktivitas ekonomi di luar pusat pertumbuhan utama. Namun, pemerataan tidak dapat dimaknai sebagai pembagian proyek dalam jumlah yang sama kepada setiap daerah. Alokasi infrastruktur perlu mempertimbangkan kesenjangan pelayanan, jumlah penduduk, potensi ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi geografis, dan fungsi strategis wilayah.

Kurniawan dan Ihsan (2021) menemukan adanya perbedaan pengaruh investasi dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi antara provinsi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan bersifat spasial: infrastruktur yang sama dapat memberikan hasil berbeda karena kondisi awal, kepadatan kegiatan ekonomi, kesiapan tenaga kerja, dan kelengkapan jaringan pendukung yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan pemerataan infrastruktur harus disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat perkembangan setiap wilayah.

Pambudi dan Sitorus (2021) menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan pembangunan dan penataan ruang. Infrastruktur yang tidak sesuai dengan struktur ruang dapat menimbulkan konflik penggunaan lahan, keterputusan jaringan, dan ketidakefisienan investasi. Dalam konteks pemerataan, keterpaduan tata ruang diperlukan agar jalan, kawasan produksi, permukiman, pusat pelayanan, dan jaringan utilitas saling mendukung serta tidak hanya terkonsentrasi di pusat perkotaan.

Pemerataan juga perlu dipahami dari sisi manfaat, bukan hanya lokasi fisik. Suatu proyek dapat dibangun di daerah tertinggal, tetapi manfaat ekonominya lebih banyak mengalir ke pusat ekonomi lain apabila tenaga kerja, pemasok, pembiayaan, dan penguasaan pasarnya berasal dari luar wilayah. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu dihubungkan dengan pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, penguatan rantai pasok daerah, serta akses terhadap pembiayaan dan teknologi.

Setiawan et al. (2024) menunjukkan bahwa pembangunan inklusif dan industrialisasi memerlukan waktu untuk memberikan dampak terhadap kesejahteraan. Dalam jangka panjang, keduanya dapat menghasilkan pengaruh positif apabila manfaat pertumbuhan dapat menjangkau masyarakat secara luas. Temuan tersebut relevan bagi kebijakan infrastruktur karena pembangunan fisik baru akan mendorong pemerataan ketika terhubung dengan penciptaan pekerjaan produktif, peningkatan pendapatan, dan berkembangnya kegiatan ekonomi lokal.

Dengan demikian, terdapat hubungan antara pemerataan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi antardaerah, tetapi hubungan tersebut tidak bersifat otomatis atau seragam. Pemerataan infrastruktur dapat memperkecil kesenjangan apabila diarahkan untuk mengurangi kesenjangan akses, menghubungkan wilayah tertinggal dengan pusat produksi dan pasar, serta meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat lokal. Sebaliknya, pembangunan dapat memperbesar ketimpangan apabila investasi hanya memperkuat wilayah yang telah maju atau tidak disertai pengembangan kapasitas daerah penerima.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pembangunan Infrastruktur dalam Menciptakan Pemerataan Ekonomi

Berdasarkan sintesis literatur, efektivitas pembangunan infrastruktur dalam menciptakan pemerataan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut mencakup ketepatan perencanaan, kualitas tata kelola, keberlanjutan pembiayaan, konektivitas jaringan, kesesuaian dengan potensi daerah, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan pemeliharaan infrastruktur.

Pertama, kualitas perencanaan dan penentuan prioritas merupakan faktor mendasar. Infrastruktur perlu dibangun berdasarkan kebutuhan nyata dan kesenjangan pelayanan, bukan semata-mata berdasarkan kemudahan pelaksanaan atau kepentingan jangka pendek. Pambudi dan Sitorus (2021) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus terintegrasi secara substansi, spasial, dan pendanaan dengan rencana tata ruang. Integrasi tersebut membantu memastikan bahwa proyek mempunyai hubungan dengan pusat produksi, kawasan permukiman, jaringan logistik, dan fasilitas pelayanan lainnya.

Kedua, tata kelola dan koordinasi antarlembaga menentukan keberhasilan proyek. Pembangunan infrastruktur sering melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat. Ketidaksinkronan kewenangan dan program dapat menghasilkan jaringan yang terputus atau fasilitas yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, diperlukan pembagian tanggung jawab yang jelas, transparansi anggaran, pengawasan, dan koordinasi lintas wilayah.

Ketiga, keberlanjutan pembiayaan perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan. Mubin (2019) mengingatkan bahwa pembiayaan infrastruktur harus mempertimbangkan risiko fiskal dan tingkat pengembalian ekonomi proyek. Pembiayaan tidak hanya mencakup biaya konstruksi, tetapi juga pembebasan lahan, operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Infrastruktur yang selesai dibangun tetapi tidak dipelihara akan mengalami penurunan kualitas dan kehilangan manfaat ekonominya.

Keempat, konektivitas dan integrasi jaringan menentukan luasnya manfaat infrastruktur. Jalan lokal, jalan regional, pelabuhan, terminal, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi perlu membentuk satu sistem yang saling berhubungan. Ali dan Maskur (2022) memperlihatkan bahwa pengaruh jalan terhadap pertumbuhan dapat relatif kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa penambahan panjang jalan saja tidak cukup apabila kualitas, kondisi, dan keterhubungannya dengan kegiatan produktif belum memadai.

Kelima, kesesuaian infrastruktur dengan struktur dan potensi ekonomi lokal sangat menentukan. Daerah pertanian membutuhkan jaringan irigasi, jalan produksi, penyimpanan, dan akses pasar; daerah industri membutuhkan energi, logistik, dan telekomunikasi; sedangkan daerah kepulauan membutuhkan konektivitas laut dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kondisi geografisnya. Zahrah dan Rahayu (2024) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, kualitas masyarakat, koordinasi, dan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, desain pembangunan perlu bersifat kontekstual.

Keenam, kualitas sumber daya manusia dan kapasitas usaha lokal memengaruhi kemampuan masyarakat memanfaatkan infrastruktur. Infrastruktur dapat membuka akses pasar, tetapi masyarakat tetap

membutuhkan keterampilan, modal, teknologi, dan informasi agar dapat mengembangkan kegiatan produktif. Temuan Dewi et al. (2022) mengenai pertumbuhan UMKM menunjukkan bahwa infrastruktur jalan dapat memberikan manfaat ketika terhubung langsung dengan aktivitas usaha masyarakat.

Ketujuh, partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan relevansi dan keberlanjutan proyek. Masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai hambatan akses, pola mobilitas, potensi ekonomi, dan risiko sosial-lingkungan di wilayahnya. Pelibatan masyarakat sejak identifikasi kebutuhan hingga evaluasi dapat mengurangi ketidaksesuaian proyek dan meningkatkan rasa memiliki. Partisipasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa kelompok miskin, masyarakat terpencil, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya memperoleh manfaat yang setara.

Kedelapan, keberlanjutan lingkungan perlu menjadi bagian dari penilaian efektivitas. Infrastruktur yang mempercepat pertumbuhan dalam jangka pendek tetapi menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik lahan, atau peningkatan risiko bencana tidak dapat disebut efektif secara berkelanjutan. Zahrah dan Rahayu (2024) menekankan perlunya koordinasi pemerintah dan masyarakat, pengembangan ekonomi hijau dan biru, peningkatan infrastruktur, serta perlindungan kualitas sumber daya alam.

Kesembilan, evaluasi manfaat harus dilakukan secara berkala. Evaluasi tidak cukup hanya mengukur realisasi anggaran dan penyelesaian fisik. Indikator perlu mencakup perubahan waktu tempuh, biaya logistik, akses pelayanan dasar, investasi, kesempatan kerja, perkembangan UMKM, PDRB, kemiskinan, dan ketimpangan. Sebayang dan Sebayang (2020) menunjukkan bahwa dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan dan ketimpangan dapat berbeda antarwilayah. Oleh karena itu, evaluasi diperlukan agar kebijakan dapat disesuaikan berdasarkan hasil nyata.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur akan lebih efektif dalam menciptakan pemerataan ekonomi apabila dilaksanakan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis wilayah. Infrastruktur fisik perlu disertai pengembangan sumber daya manusia, penguatan usaha lokal, tata kelola yang akuntabel, pembiayaan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal. Dengan pendekatan tersebut, infrastruktur tidak hanya meningkatkan output ekonomi, tetapi juga memperluas akses dan kesempatan ekonomi secara lebih adil.

4. CONCLUSION

Pembangunan infrastruktur pada umumnya memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas, produktivitas, efisiensi distribusi, investasi, dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Namun, pengaruh tersebut tidak selalu sama pada setiap daerah dan jenis infrastruktur. Besarnya dampak ditentukan oleh kualitas infrastruktur, keterhubungan jaringan, kesesuaian dengan kebutuhan wilayah, tingkat pemanfaatan, serta kemampuan sektor ekonomi lokal dalam merespons peluang yang tercipta. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya anggaran atau jumlah proyek, tetapi harus dilihat dari manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan.

Pemerataan pembangunan infrastruktur memiliki hubungan penting dengan pertumbuhan ekonomi antardaerah karena dapat memperluas akses pasar, menurunkan biaya logistik, membuka wilayah yang relatif tertinggal, dan menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih merata. Meskipun demikian, pemerataan infrastruktur tidak berarti membagi proyek dalam jumlah yang sama kepada setiap daerah. Pembangunan harus diarahkan berdasarkan kesenjangan pelayanan, karakteristik geografis, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan potensi ekonomi wilayah. Infrastruktur dapat mengurangi ketimpangan apabila mampu memperkuat kegiatan ekonomi lokal, tetapi juga dapat memperbesar kesenjangan apabila manfaatnya hanya terkonsentrasi pada wilayah yang telah maju.

Efektivitas pembangunan infrastruktur dalam menciptakan pemerataan ekonomi dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan, kualitas tata kelola, kesinambungan pembiayaan, konektivitas jaringan, kesesuaian dengan potensi daerah, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, pemeliharaan, dan keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur fisik perlu disertai dengan pengembangan keterampilan masyarakat, penguatan UMKM, akses pembiayaan, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan wilayah akan menjadikan infrastruktur tidak hanya sebagai sarana peningkatan output ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

REFERENCES

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Ali, M. M., & Maskur. (2022). Analisis infrastruktur jalan atas pertumbuhan PDRB di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 4(2). https://doi.org/10.56630/jti.v4i2.245
- Almismary, M. D., & Wahyono, H. (2020). Pengaruh perkembangan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 16(4), 263–276. https://doi.org/10.14710/pwk.v16i4.25338
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177–200. https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0
- Banister, D. (Ed.). (1995). *Transport and urban development*. E & FN Spon.
- Budiyanti, E. (2017). Dampak liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Kajian*, 22(1), 45–57. https://doi.org/10.22212/kajian.v22i1.1497
- Dewi, W. P., Basuki, P., & Alwi, M. (2022). Analisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan UMKM di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, 2(1). https://doi.org/10.29303/oportunitas.v2i1.498
- Duranton, G., & Turner, M. A. (2011). The fundamental law of road congestion: Evidence from US cities. *American Economic Review*, 101(6), 2616–2652. https://doi.org/10.1257/aer.101.6.2616
- Glaeser, E. L., Kahn, M. E., & Rappaport, J. (2008). Why do the poor live in cities? The role of public transportation. *Journal of Urban Economics*, 63(1), 1–24. https://doi.org/10.1016/j.jue.2006.12.004
- Hutajulu, H., Runtunuwu, P. C. H., Judijanto, L., Ilma, A. F. N., Ermanda, A. P., Fitriyana, Mudjiyanti, R., Maichal, Boari, Y., Laksono, R. D., Saktisyahputra, Basir, I., Margoutomo, S. A. S., & Wardhana, D. H. A. (2024). *Sustainable economic development: Teori dan landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan multisektor di Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kurniawan, A., & Ihsan, M. (2021). Infrastruktur, investasi dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi: Kasus pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(2), 78–88. https://doi.org/10.23969/jrie.v1i2.15
- Ma'rifah, A. (2022). The effect of infrastructure development on economic growth. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 5(3), 230–241. https://doi.org/10.15294/efficient.v5i3.54394
- Matondang, K. A., Hutahaean, R., Sitio, V., & Manurung, E. V. (2024). Analisis pengaruh pemerataan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 3948–3955. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1303
- Mubin, C. (2019). Modelling the effect of infrastructure development acceleration on sustainable economic growth in Indonesia. *CSID Journal of Infrastructure Development*, 2(1), 31–39. https://doi.org/10.32783/csid-jid.v2i1.27
- Mubin, C. (2019). Modelling the effect of infrastructure development acceleration on sustainable economic growth in Indonesia. **CSID Journal of Infrastructure Development*, 2(1), 31–39. https://doi.org/10.32783/csid-jid.v2i1.27
- Nasikhah, L. F., & Susilowati, D. (2024). Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 8(1), 68–80. https://doi.org/10.22219/jie.v8i01.31773
- Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. P. (2021). Omnibus law dan penyusunan rencana tata ruang: Konsepsi, pelaksanaan, dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(2), 198–216. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2216
- Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. P. (2021). Omnibus law dan penyusunan rencana tata ruang: Konsepsi, pelaksanaan, dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(2), 198–216. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2216
- Panama, H. Y., Zuhroh, I., & Nuraini, I. (2019). Pengaruh infrastruktur pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 3(3). https://doi.org/10.22219/jie.v3i3.9545
- Ramadhan, M. (2019). Analyzing public infrastructure and economic growth in Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(11), 1144–1148.

- Ramadhan, M. (2019). Analyzing public infrastructure and economic growth in Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(11), 1144–1148. [Tautan artikel](https://www.researchgate.net/publication/337591484_Analyzing_Public_Infrastructure_And_Economic_Growth_In_Indonesia)
- Sebayang, A. F., & Sebayang, L. K. (2020). Infrastructure investment and its impact to regional development. *Economics Development Analysis Journal*, 9(3), 269–280. <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i3.38859>
- Setiawan, A. B., Prasetyo, F. H., Yusuf, M., Prajanti, S. D. W., Bowo, P. A., & Fafurida. (2024). Pembangunan inklusif dan industrialisasi di Indonesia: Dampaknya terhadap kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 24(2), 153–166. <https://doi.org/10.21002/jepi.2024.10>
- Setiawan, A. B., Prasetyo, F. H., Yusuf, M., Prajanti, S. D. W., Bowo, P. A., & Fafurida. (2024). Pembangunan inklusif dan industrialisasi di Indonesia: Dampaknya terhadap kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 24(2), 153–166. <https://doi.org/10.21002/jepi.2024.10>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suripto, S., & Lestari, E. D. (2019). Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap PDRB di provinsi Indonesia. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 22(1), 15–27. <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i1.146>
- Suripto, S., & Lestari, E. D. (2019). Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap PDRB di provinsi Indonesia. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 22(1), 15–27. <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i1.146>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Zahrah, F., & Rahayu, S. (2024). Hambatan dan peluang pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan: Tinjauan literatur kritis. *Jurnal Archipelago*, 3(1), 67–81. <https://doi.org/10.69853/ja.v3i01.107>
- Zahrah, F., & Rahayu, S. (2024). Hambatan dan peluang pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan: Tinjauan literatur kritis. *Jurnal Archipelago*, 3(1), 67–81. <https://doi.org/10.69853/ja.v3i01.107>